

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024



1

KABUPATEN CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN 2024

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

BABI	PENDAHULUAN
	A Visi dan Misi Kabupaten Cirebon
	B Tujuan dan Sasaran
	C Strategi dan Kebijakan
	D Program dan Kegiatan
BABII	GAMBARAN UMUM ORGANISASI.....
	A TUGAS DAN FUNGSI STRUKTUR ORGANISASI
	B VISI MISI KABUPATEN CIREBON
	c EVALUASI TRIWULAN 2 PADA ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN . 2024.....
BABIII	PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2024
BAB IV	PENUTUP
	LAMPIRAN – LAMPIRAN 2

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam kedudukan dan fungsinya pemerintah kecamatan memiliki posisi yang sangat penting karena keberhasilan tugas Pemerintah/ Pemerintah Kabupaten dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, perekonomian, kemasyarakatan, ketenteraman dan ketertiban serta mengembangkan potensi wilayah sangat ditunjang oleh keberadaan pemerintah kecamatan, untuk itu tantangan yang harus dijawab adalah bagaimana mewujudkan Pemerintah Kecamatan yang berwibawa dan mampu memberikan pelayanan serta memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang.

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka penyusunan Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Tahun 2020. Memenuhi maksud tersebut, kiranya upaya untuk memperkuat Pemerintah Kecamatan maka dikeluarkan³ Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Cirebon yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Cirebon Nomor 73 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan, dengan didasarkan pada ketentuan Pasal 25 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Bupati/Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum pada tingkat Kecamatan melimpahkannya kepada camat, dan untuk Kabupaten Cirebon telah dikeluarkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Dari Bupati Kepada Camat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 67 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Dari Bupati Kepada Camat yang terdiri dari bidang urusan dan rincian urusan.

Melalui urusan tersebut, Kecamatan Plered berupaya meningkatkan kemampuan pelayanan yang profesional, efektif, efisien, akuntabel dan transparan, dengan

meningkatkan perbaikan proses mekanisme perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan dan evaluasi serta mengharapkan kiranya Pemerintah Kabupaten segera menyusun berbagai kebijakan, yang menunjang pada kelancaran pelaksanaan tugas pelimpahan sebagian urusan yang diberikan Bupati Cirebon kepada Camat agar mempercepat proses pelayanan kepada masyarakat.

Permasalahan utama yang dihadapi Kecamatan Plered adalah sebagai berikut :

1. Dengan adanya Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Dari Bupati Kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya Visi Kabupaten Cirebon;
2. Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah. Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh-sungguh memperhatikan *Corporate Social Responsibility (CSR)*, maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
3. Pelayanan Prima, Kecamatan sebagai salah satu SKPD di Pemerintah Kabupaten Cirebon yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima⁴ kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Pelayanan (SP) yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamikan aktivitas masyarakat;
4. Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha

dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur;

5. Sebagai wilayah yang memiliki posisi strategis memiliki potensi wisata dan potensi ekonomi produktif rumah tangga berbasis industri meubelair, industri batik dan kerajinan rotan yang cukup layak untuk dikembangkan, maka Kecamatan Plered harus betul-betul memanfaatkan posisi dan potensi yang dimiliki, guna mendorong kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

BAB II

GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Kecamatan Plered adalah merupakan salah satu kecamatan dari 40 kecamatan di Kabupaten Cirebon, Kecamatan Plered adalah hasil pemekaran dari Kecamatan Weru. Wilayah ini mempunyai posisi sangat strategis sebagai bagian dari jalur tengah lintasan antara Kabupaten Cirebon dan Kota Cirebon.

a. Kondisi Geografis

Kecamatan Plered terletak diantara $06^{\circ}39'26.42''$ sampai dengan $06^{\circ}42'39.99''$ Lintang Selatan (LS) dan diantara $108^{\circ}29'23.07''$ sampai dengan $108^{\circ}32'37.97''$ Bujur Timur (BT) yang terbentang dari utara hingga selatan dan memiliki luas wilayah 11.40134Km^2 , yang terdiri dari pekarangan seluas 8.84844Km^2 dan persawahan seluas 2.55290Km^2 . Jarak terjauh dari arah Barat ke Timur sepanjang 5Km dan Utara ke Selatan sepanjang 9Km. Jarak dari Ibukota Kecamatan ke Ibukota Kabupaten sejauh 9,5Km.

Batas administrasi wilayah Kecamatan Plered adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kecamatan Gunung Jati dan Kecamatan Suranenggala
- Sebelah Selatan : Kecamatan Weru
- Sebelah Barat : Kecamatan Plumbon dan Kecamatan Jamblang⁶
- Sebelah Timur : Kecamatan Tengah Tani

b. Kondisi Topografi

Permukaan tanah di Kecamatan Plered merupakan daerah datar (Hampan), dengan tingkat kemiringan lahan kurang dari 15° , serta memiliki ketinggian antara 6-7 meter diatas permukaan air laut.

c. Kondisi Klimatologi

Berdasarkan klasifikasi Schmidt dan Ferguson, iklim di Kecamatan Plered termasuk tipe B/C (Q=56,06%). Tipe ini memiliki rata-rata bulan kering 3,7 dan rata-rata bulan basah 6,6. Tipe ini termasuk golongan daerah beriklim sedang-hujan dengan curah hujan rata-rata 1.500-4.000mm per tahun.

Suhu tertinggi mencapai 33°C dan suhu terendah sekitar 24°C dengan suhu rata-rata 28°C. Kisaran suhu sebesar itu dikategorikan sebagai daerah tropis. Wilayah Plered juga dipengaruhi oleh Angin Kumbang yang bersifat kering.

d. Keadaan Hidrologi

Sumber-sumber air yang ada di Kabupaten Cirebon berasal dari air permukaan dan air bawah tanah. Sumber air permukaan berasal dari beberapa sungai kecil seperti : Sungai Soka, Sungai Silayur dan Sungai Cipager yang bermuara di Sungai Bondet, Sungai Condong dan Sungai Pekik.

e. Kondisi Administrasi Pemerintahan

Kecamatan Plered meliputi 10 Desa, 25 Dusun, 47 RW dan 172 RT. Dalam hal ini masih cukup banyak Desa-Desa yang secara administratif terdapat beberapa Dusun, namun pada kenyataannya hanya sebutannya saja, sehingga wilayah kerjanya adalah RW.

f. Kondisi Demografi

Kecamatan Plered adalah salah satu di antara kecamatan-kecamatan di Kabupaten Cirebon yang mempunyai jumlah penduduk cukup besar. Penduduk Kecamatan Plered pada Tahun 2021 adalah sebanyak 55.303 jiwa, yang terdiri dari 28.059 Laki-Laki dan 27.244 Perempuan, dengan rata-rata kepadatan penduduk sebesar 4.495 jiwa per Km².

Dari total penduduk sebagian besar diantaranya adalah laki-laki sehingga sex rasionya adalah 102,99. Penyebaran penduduk Kecamatan Plered per Desa hingga pada tahun 2021 masih menunjukkan kondisi kurang merata seperti tahun-tahun sebelumnya. Penduduk terbesar terdapat di Desa

Tegalsari yaitu sebanyak 8.941 jiwa dengan sebaran/distribusi penduduknya sebesar 16,00% dan yang terkecil adalah Desa Trusmi Wetan dengan jumlah penduduk hanya 2.766 jiwa (sebaran penduduk sebesar 5,00%).

Kepadatan penduduk di masing-masing Desa juga menunjukkan ketidakmerataan. Hal ini disebabkan kondisi dan potensi masing-masing wilayah Desa Perkotaan, dimana banyak terdapat kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat di berbagai bidang usaha yang dapat memberikan lapangan pekerjaan seperti

perdagangan, industri, pengangkutan, pertanian, pertambangan, pemerintahan, jasa-jasa dan lain-lain.

Dalam rangka turut meningkatkan pemerataan penduduk di Indonesia pada Tahun 2012, Kecamatan Plered melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cirebon telah mengirimkan sebanyak 1 KK (2 jiwa).

g. Kondisi Ekonomi

Dalam perencanaan pembangunan ekonomi suatu daerah dan untuk mengetahui sampai seberapa jauh keberhasilan pembangunan ekonomi tersebut, diperlukan bermacam-macam data statistik yang dapat dijadikan bahan evaluasi pembangunan ekonomi yang telah dicapai dan perencanaannya di masa yang akan datang.

Pada dasarnya pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, memperluas lapangan pekerjaan, pemerataan pembagian pendapatan, meningkatkan⁸ hubungan ekonomi antar wilayah/desa dan mengupayakan terjadinya pergeseran kegiatan ekonomi yang semula dari sektor primer, yaitu sektor yang bergantung pada jenis lapangan usaha pertanian, kepada sektor sekunder (lapangan usaha industri pengolahan, listrik gas dan air minum, konstruksi/bangunan) serta sektor tersier (lapangan usaha perdagangan, hotel dan restoran, angkutan dan komunikasi, bank/lembaga keuangan, perusahaan persewaan, jasa pemerintahan dan jasa swasta).

Salah satu data statistik yang sangat diperlukan untuk evaluasi dan perencanaan ekonomi makro adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang disajikan secara series.

Angka-angka yang disajikan secara sektoral memperlihatkan tentang struktur perekonomian suatu daerah, apakah menunjukkan ke arah daerah yang agraris atau industri. Berdasarkan data dari masing-masing sektor dapat dilihat

peranan dan sumbangan tiap sektor terhadap jumlah pendapatan secara keseluruhan.

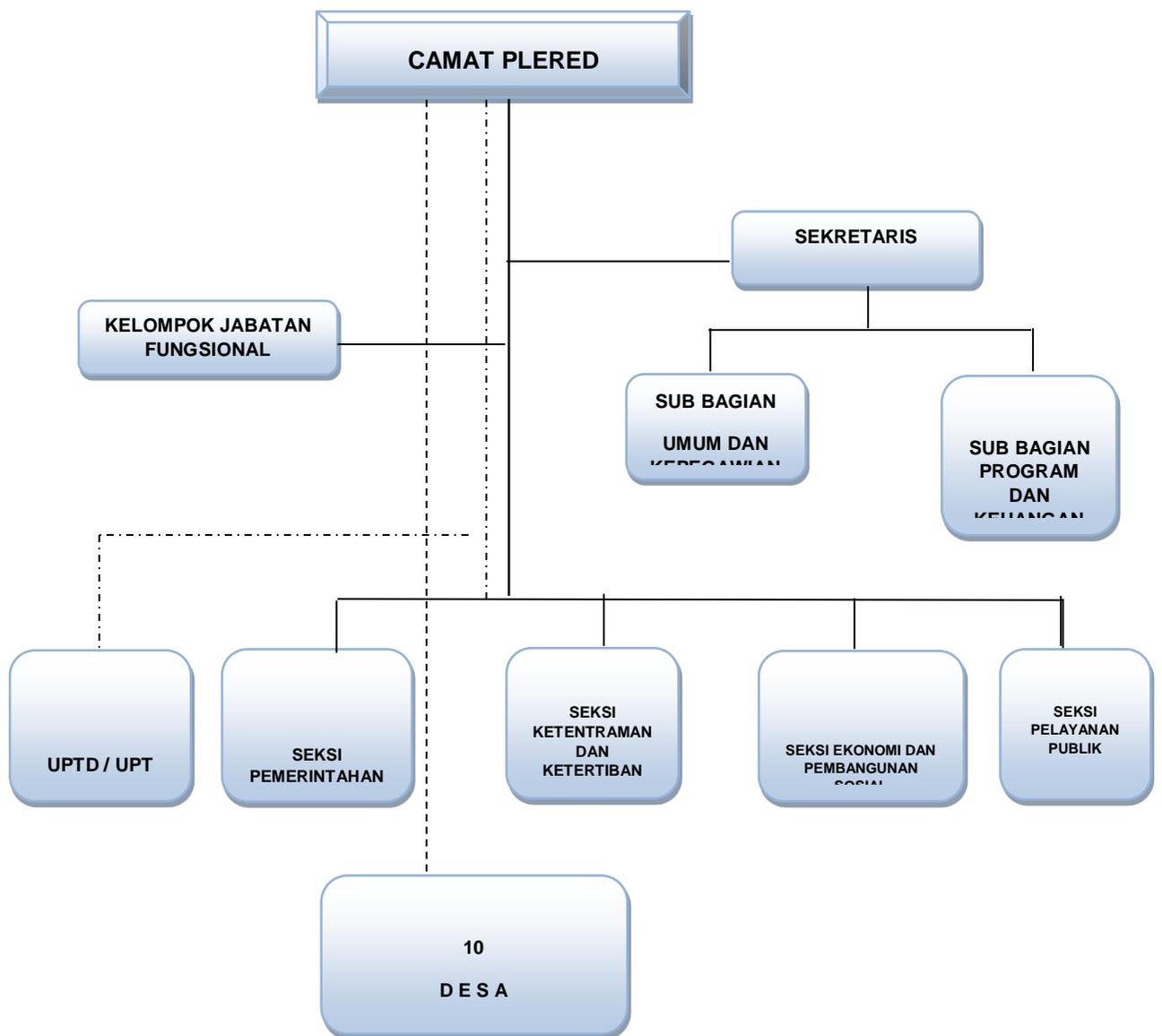
Dengan adanya gambaran perekonomian suatu daerah, merupakan bahan bagi para perencana ekonomi, baik di kalangan pemerintah maupun swasta, untuk menentukan ke arah mana daerah tersebut akan dikembangkan.

h. Kondisi Pendidikan

Penyebaran Sekolah Dasar di Kecamatan Plered sudah cukup merata dan proporsional dengan jumlah penduduk secara umum.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 20 Tahun 2021 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Cirebon, maka Struktur Organisasi Kecamatan Plered adalah sebagai berikut:

**STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR KECAMATAN PLERED
KABUPATEN CIREBON**



DAFTAR SUSUNAN PEGAWAI KECAMATAN PLERED

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOLONGAN RUANG	JABATAN
1.	DINDIN WAHYUDIN RIDWAN, S.Sos NIP. 19700207 199006 1 001	Pembina Tingkat I (IV/b)	Camat
2.	SARTONO, -, SKM., M.P.H NIP. 19720926 199402 1 001	Pembina, IV/a	Sekretaris Camat
3.	YANDI BUDI RISWANDI, S.Sos NIP. 19680728 199702 1 001	Penata Tingkat I (III/d)	Kepala Seksi Pemerintahan
4.	ROSA ADI SUSILO, S.Sos. NIP. 19750103 200901 1 002	Penata (III/c)	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
5.	YETI ERNAWATININGSIH, SE NIP. 19700724 199903 2 004	Penata Tingkat I (III/d)	Kepala Seksi Pendapatan dan Pelayanan Umum
6.	ANINDA PUJI PUTRANTI, SAB. NIP. 19850216 200902 2 001	Penata (III/c)	Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Sosial
7.	A. TOHARI, S.Sos.I, M.SiNIP. 19781007 200901 1 005	Penata (III/c)	Ka Subag Umum dan Kepegawaian
8.	KUSTANDI, SE NIP. 19750424 200901 1 003	Penata (III/c)	Ka Subag Program dan Keuangan
9.	SAHDIYANTO NIP. 19800513 200801 1 005	Penata Muda (III/a)	Pelaksana
10.	H. MOHAMMAD MUSLIMIN NIP. 19671024 200701 1 021	Penata Muda (III/a)	Pelaksana/Bendahara
11.	MISKAD MASDUKI NIP. 19670317 200701 1 018	Penata Muda (III/a)	Pelaksana
12.	EDI SANJAYA NIP. 19791212 200801 1 006	Penata Muda (III/a)	Pelaksana
13.	RAPI NIP. 19720304 200701 1 029	Penata Muda (III/a)	11 Pelaksana
14.	PUJI HASTUTI NIP. 19690611 200701 2 013	Penata Muda (III/a)	Pelaksana

A. Visi dan Misi Kabupaten Cirebon

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas program, agar mampu eksis dan unggul dalam persaingan yang semakin ketat dalam lingkungan yang berubah sangat cepat, maka suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil.

Selanjutnya perumusan dan penetapan Mengacu kepada Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Cirebon bahwa Kecamatan Plered sebagai Kecamatan yang harus mampu untuk melaksanakan tugas dan fungsi dengan cepat, tepat dan benar serta efektif dan efisien dengan melayani masyarakat atau pihak lain dengan efektif dan efisien baik waktu maupun peraturan

yang berlaku, sehingga agenda utama yang harus dilakukan adalah penataan internal organisasi dalam kerangka mempersiapkan segala sumber daya yang ada untuk optimalisasi penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat. Pencapaian terhadap visi tersebut juga diyakini akan menjadi kunci sukses bagi berbagai penyelenggaraan program pemerintah dimasa yang akan datang.

Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan yang ada di Kabupaten Cirebon, agar lebih terarah dan berhasil guna serta berdaya guna, maka pemerintah bersama – sama masyarakat Kabupaten Cirebon telah menetapkan visi, misi dan strategi dalam mencapai tujuannya yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2019 – 2024 disusun visi sebagai berikut :

“TERWUJUDNYA KABUPATEN CIREBON BERBUDAYA, SEJAHTERA, AGAMIS, MAJU DAN AMAN”

Visi ini menggambarkan keinginan Pemerintah Kabupaten Cirebon untuk menjadikan wilayah Kabupaten Cirebon dalam kondisi sejahtera dan memiliki daya saing pada 5 (lima) elemen kehidupan Kabupaten Cirebon yaitu Cirebon Berbudaya, Cirebon Sejahtera, Cirebon Agamis, Cirebon Maju dan Cirebon Aman. Secara filosofis visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung di dalamnya yaitu :

1. Berbudaya : Berbudaya mengandung pengertian mempunyai pikiran dan akal yang sudah maju. Berbudaya kerap juga diartikan sebagai beradab. Berbudaya dalam konteks ini lebih pada penghargaan atas nilai-nilai yang mengandung keluhuran dan kebaikan yang menjadi tradisi lokal, baik dalam bentuk pengetahuan, sikap, tutur hingga simbol-simbol atas nilai tersebut;
2. Sejahtera : Sejahtera dimaksudkan sebagai suatu kondisi dimana masyarakat merasa aman karena terpenuhinya kebutuhan dasar, baik aman secara ekonomi, politik, pendidikan, kesehatan dan sosial;
3. Agamis : Agamis dimaksudkan bahwa agama menjadi landasan nilai dasar masyarakat dalam berperilaku, baik secara individual maupun sosial. Nilai agama yang mengajarkan kebaikan diharapkan mampu menjadi ruh dalam sikap individu, sehingga tercipta suasana yang aman, harmonis dan produktif;
4. Maju : Maju mempunyai makna menjadikan Kabupaten Cirebon sebagai daerah yang maju dan meningkat dari kondisi masa lalu. Maju juga berarti pembangunan daerah harus dapat menciptakan peningkatan dalam kesejahteraan masyarakat dengan terpenuhinya berbagai kebutuhan dasar serta tersedianya sarana dan prasarana dasar yang memadai, meningkatnya kualitas sumber daya manusia dengan terpenuhinya kebutuhan dan peningkatan akses terhadap pendidikan

yang berkualitas, semakin meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, semakin baiknya kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah guna mendorong peningkatan perekonomian, peningkatan kualitas sumber daya manusia masyarakat Kabupaten Cirebon agar selaras dengan kebutuhan pasar kerja yang semakin kompetitif dan siap berperan dalam menghadapi perubahan sistem global. Maju juga dimaksudkan sebagai kondisi tercapainya pelayanan publik

yang baik dengan dukungan pemerintah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses penentuan kebijakan pembangunan yang menyangkut hajat orang banyak; Aman : Aman dimaksudkan sebagai kondisi di mana tata kehidupan masyarakat yang tertib dan tenteram, sehingga diharapkan masyarakat dapat melanngsungkan kehidupan dengan tenang dan damai, yang menjamin terselenggaranya pembangunan.

Untuk mewujudkan visi pembangunan daerah tersebut, maka ditetapkan misi yang merupakan penjabaran dari visi. Sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2019 - 2024, maka ditetapkan misi Kabupaten Cirebon yaitu :

1. Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Cirebon Yang Menjunjung Tinggi Dan Melestarikan Nilai-Nilai Budaya, Tradisi Dan Adat Istiadat, Misi ini dimaksud untuk Melestarikan dan menumbuhkembangkan budaya masyarakat.
2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Melalui Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat, Peningkatan Kualitas Pendidikan Dan Pelatihan, Kesehatan Dan Ekonomi, Misi ini dimaksud untuk Mewujudkan pembangunan manusia yang berkualitas dan sejahtera.
3. Meningkatnya Kualitas Kehidupan Masyarakat Kabupaten Cirebon Yang Senantiasa Menerapkan Nilai Agama, Budi Pekerti, Santun, Dan Beretika, Misi ini dimaksud untuk Meningkatkan Kesalehan sosial dan kerukunan antar dan inter umat beragama.
4. Meningkatnya Produktivitas Masyarakat Untuk Lebih Maju Dan Unggul Sehingga Menambah Daya Saing Di Pasar Internasional, Nasional Dan Regional, Yang Didukung Oleh Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah, Misi ini dimaksud untuk Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah yang berkeadilan berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan serta Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik bersih dan smart serta penguatan otonomi desa.
5. Memelihara Keamanan Dan Ketertiban Umum Untuk Mewujudkan Kondusivitas Daerah Guna Mendukung Terciptanya Stabilitas Nasional, Misi ini

dimaksud untuk Meningkatkan keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat.

B. Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi, juga merupakan operasionalisasi dari misi. Tujuan merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun, sehingga fokus organisasi dapat lebih diarah kepada sasaran yang akan dicapai.

Berdasarkan beberapa misi sebagaimana telah dijelaskan di atas maka sebagai langkah selanjutnya Kecamatan Plered telah menjabarkan lagi misi tersebut menjadi beberapa Indikator. Melalui penjabaran indikator tersebut dapat menunjukkan apa yang akan dicapai misi Kecamatan Plered seperti yang tertuang dalam Renstra untuk program 5 (lima) tahun kedepan. Dari Misi dan Tujuan agar dapat lebih menggambarkan sesuatu yang akan dicapai lebih nyata maka juga telah ditentukan sasaran sebagai yang tercantum dalam lampiran Rencana Strategis

(Renstra) Kecamatan Plered Tahun 2019 – 2024, adapun tujuan dari misi di atas adalah sebagai berikut :

“Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik”.

b. SASARAN

Sejalan dengan Visi, Misi dan Tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Pelayanan Publik di Kecamatan;
2. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan;
3. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat.

14

C. Strategi dan Kebijakan

a. Strategi

Cara mencapai tujuan dan sasaran agar mencapai hasil yang konsisten dengan Visi dan Misi yang telah ditetapkan, maka perlu disusun suatu strategi organisasi yang menjalankan pemikiran-pemikiran secara Konseptual, analitis, realistis, rasional dan komprehensif tentang berbagai langkah yang diperlukan guna mencapai atau mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi merupakan rencana yang mencakup upaya-upaya menyeluruh dan terintegrasi untuk mengoperasionalkan tujuan dan sasaran melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan dengan memperhatikan berbagai kondisi lingkungan internal maupun eksternal organisasi. Strategi juga mencakup masalah pembiayaan, baik berasal dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten maupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat.

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, maka diperlukan beberapa langkah untuk mencapai tujuan dan sasaran. Oleh karena itu Kecamatan Plered memiliki strategi dasar dalam pencapaian tujuan dan sasarnya itu pada setiap tindakan (*action*) dan alokasi sumber daya serta sumber dana organisasi dilaksanakan sepenuhnya untuk mencapai kinerja yang diinginkan, antara lain penentuan kebijaksanaan, program dan kegiatan. Adapun strategi dari pencapaian program Kecamatan Plered adalah :

1. Optimalisasi manajemen pelayanan public tingkat Kecamatan;
2. Integrasi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan;
3. Meningkatkan kapasitas pemerintahan desa.

a. Kebijakan

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan yang harus dijadikan pedoman, pegangan dan petunjuk serta cara bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah sehingga tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam mencapai tujuan tertentu. Arah Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan yang harus dijadikan pedoman, pegangan dan petunjuk

serta cara bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah sehingga tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam mencapai tujuan tertentu. Maka Pemerintah Kecamatan Plered menetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

1. Penyederhanaan mekanisme dan standar pelayanan;
2. Peningkatan Akuntabilitas perencanaan, penganggaran, pengawasan dan pelaporan secara professional dan inovatif;
3. Mewujudkan tata Pemerintahan Desa yang baik (*good government*).

D. Program dan kegiatan

15

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
- 3) Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
- 4) Penyediaan Alat Tulis Kantor
- 5) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 6) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan
- 7) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 8) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- 9) Penyediaan Makanan dan Minuman

10) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- 1) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
- 2) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
- 3) Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- 1) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 2) Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
- 3) Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Program Pengembangan Sistem Perencanaan Sektoral

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Sektoral

Program Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat

- 1) Penyelenggaraan Pelimpahan Kewenangan Urusan Pemerintahan Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
- 2) Penyelenggaraan Pelimpahan Kewenangan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Sosial
- 3) Penyelenggaraan Pelimpahan Kewenangan Urusan Pemerintahan Bidang Keamanan Ketertiban Perlindungan Masyarakat dan Pembinaan Kesatuan Bangsa
- 4) Penyelenggaraan Pelimpahan Kewenangan Urusan Pemerintahan Bidang Pelayanan Umum
- 5) Penyelenggaraan Pelimpahan Kewenangan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Desa

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja pada Triwulan II di KECAMATAN PLERED

Analisa efektivitas adalah keterkaitan pencapaian kinerja yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran. Pada tahun 2024 telah dilakukan 15 kegiatan dari 6 program, dari hasil perhitungan efektivitas menunjukkan bahwa semua outcome kegiatan tersebut telah efektif yang berarti semua output yang dihasilkan telah dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya.

Tabel, 2.1

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA KECAMATAN PLERED SAMAPAI DENGAN BULAN JULI TAHUN 2024

PROGRAM DAN KEGIATAN		ANGGARAN	TERSERAP	SISA ANGGARAN
KECAMATAN PLERED		Rp2.602.281.796,00	Rp153.424.970,00	Rp1.031.542.443,00
7.1.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp2.271.173.996,00	Rp62.922.760,00	Rp790.936.853,00
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 2599200	Rp 300000	Rp 2299200
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	797700	0	797700
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp838.500,00	Rp300.000,00	Rp538.500,00
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp2.132.436.500,00	Rp2.072.800,00	Rp732.672.317,00
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp2.130.019.000,00	Rp0,00	Rp732.327.617,00
5.1.01	Belanja Pegawai	Rp2.130.019.000,00	Rp0,00	Rp732.327.617,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	Rp948.960.000,00	Rp0,00	Rp265.320.000,00
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp1.381.300,00	Rp1.381.300,00	Rp0,00
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Rp1.036.200,00	Rp691.500,00	Rp344.700,00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp80.512.500,00	Rp34.031.100,00	Rp26.858.400,00
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp1.910.100,00	Rp1.132.300,00	Rp777.800,00
5.2	BELANJA MODAL	Rp57.817.000,00	Rp20.366.000,00	Rp17.828.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp57.817.000,00	Rp20.366.000,00	Rp17.828.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	Rp41.522.000,00	Rp17.753.000,00	Rp4.146.000,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	Rp3.432.000,00	Rp3.432.000,00	Rp0,00
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	Rp3.432.000,00	Rp3.432.000,00	Rp0,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	Rp32.018.000,00	Rp8.249.000,00	Rp4.146.000,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	Rp27.872.000,00	Rp8.249.000,00	Rp0,00

5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	Rp4.146.000,00	Rp0,00	Rp4.146.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	Rp16.295.000,00	Rp2.613.000,00	Rp13.682.000,00
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp3.647.100,00	Rp1.877.600,00	Rp1.769.500,00
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp2.040.000,00	Rp1.190.000,00	Rp850.000,00
7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Rp12.502.900,00	Rp8.158.000,00	Rp4.344.900,00
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp1.450.000,00	Rp700.000,00	Rp750.000,00
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp1.145.400,00	Rp607.200,00	Rp538.200,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp900.000,00	Rp525.000,00	Rp375.000,00
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp30.538.896,00	Rp10.704.780,00	Rp19.834.116,00
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp20.268.896,00	Rp7.374.780,00	Rp12.894.116,00
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp10.270.000,00	Rp3.330.000,00	Rp6.940.000,00
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp25.086.900,00	Rp15.814.080,00	Rp9.272.820,00
5.1.02.02.03.0004	Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	Rp3.600.000,00	Rp3.600.000,00	Rp0,00
7.1.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp165.217.900,00	Rp26.121.040,00	Rp139.096.860,00
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rp37.206.000,00	Rp13.414.820,00	Rp23.791.180,00
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Rp11.338.200,00	Rp0,00	Rp11.338.200,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	Rp90.000,00	Rp35.400,00	Rp54.600,00
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Rp23.922.000,00	Rp12.586.220,00	Rp11.335.780,00
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp23.922.000,00	Rp12.586.220,00	Rp11.335.780,00
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Rp104.089.900,00	Rp120.000,00	Rp103.969.900,00
7.1.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp63.819.200,00	Rp36.815.770,00	Rp27.003.430,00
7.1.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp98.449.400,00	Rp27.565.400,00	Rp70.884.000,00
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rp50.000.000,00	Rp0,00	Rp50.000.000,00

7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Rp50.000.000,00	Rp0,00	Rp50.000.000,00
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Rp48.449.400,00	Rp27.565.400,00	Rp20.884.000,00
7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Rp48.449.400,00	Rp27.565.400,00	Rp20.884.000,00
7.1.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp3.621.300,00	Rp0,00	Rp3.621.300,00
JUMLAH		Rp2.602.281.796,00	Rp153.424.970,00	Rp1.031.542.443,00

- 1) Permasalahan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran:
 - a) Kegiatan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan tidak ada masalah.
 - b) Kegiatan Jasa Perbaikan peralatan kerja, terdapat permasalahan sebagai berikut : kadang Separpart susah sehingga perbaikan cukup lama.
 - c) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor terdapat permasalahan yaitu kurangnya anggaran pada ATK di Kantor Kecamatan Plered.
 - d) Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan terdapat permasalahan yaitu kurangnya anggaran pada Cetak di Kantor Kecamatan Plered.
 - e) Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan tidak ada masalah.
 - f) Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman tidak ada masalah.
 - g) Kegiatan rapat dan konsultasi keluar daerah tidak ada masalah.
- 2) Solusi Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - a) Untuk mengatasi permasalahan pada pelaksanaan kegiatan Jasa Sumber Daya Listrik, perlu dilakukan upaya penyelesaian atau solusi diantaranya adalah : penambahan daya listrik.
 - b) Untuk mengatasi permasalahan pada pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan adalah Mengusulkan dan menambahkan anggaran pada kegiatan diatas untuk pemenuhan kebutuhan operasional kantor yang sesuai kebutuhan.
 - c) Untuk mengatasi permasalahan pada pelaksanaan Kegiatan Jasa Perbaikan peralatan kerja perlu dilakukan upaya penyelesaian atau solusi diantaranya adalah : mencari cadangan sparpart yang menyediakan komponen tersebut.
 - d) Untuk mengatasi permasalahan pada pelaksanaan Kegiatan peralatan dan perlengkapan kantor perlu dilakukan upaya penyelesaian atau solusi diantaranya adalah : Mengusulkan anggaran peralatan dan perlengkapan kantor yang lebih besar dan sesuai kebutuhan.
- 3) Permasalahan Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur :
 - a) Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor terdapat permasalahan yaitu kurangnya anggaran pada kebutuhan bahan peralatan kebersihan dan bahan pembersih untuk kantor Kecamatan Plered.
 - b) Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional tidak ada masalah.
 - c) Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor terdapat masalah yaitu : sandaran bangunan yang sudah retak, tempat parkir sudah mau ambruk dan bangunan ruangan sekretariat yang kurang luas.
- 4) Solusi Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur :
 - a) Untuk Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor adalah Mengusulkan dan menambahkan anggaran pada kegiatan diatas untuk pemenuhan kebutuhan operasional kantor yang sesuai kebutuhan.

- b) Untuk mengatasi permasalahan pada pelaksanaan kegiatan Jasa Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor, perlu dilakukan upaya penyelesaian atau solusi diantaranya adalah : Mengusulkan anggaran Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor yang lebih besar dan sesuai kebutuhan.
- 5) Permasalahan Program Peningkatan Disiplin Aparatur
 - a) Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya tidak ada masalah
 - 6) Permasalahan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
 - b) Kegiatan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD tidak ada masalah
 - c) Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran tidak ada masalah
 - d) Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun tidak ada masalah
 - 7) Permasalahan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan Sektoral.
 - a) Kegiatan penyusunan Dokumen Perencanaan Sektoral tidak ada masalah
 - 8) Permasalahan Program Peningkatan Pelimpahan sebagian Kewenangan Pemerintah kepada Camat
 - a.) Kegiatan pengendalian sebagian kewenangan pemerintah kepada Camat bidang Ekonomi, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat tidak ada masalah
 - b.) Kegiatan pengendalian sebagian kewenangan pemerintah kepada Camat bidang Kesejahteraan Sosial tidak ada masalah
 - c.) Kegiatan pengendalian sebagian kewenangan pemerintah kepada Camat bidang Keamanan ketertiban perlindungan masyarakat dan pembinaan kesatuan bangsa tidak ada masalah
 - d.) Kegiatan pengendalian sebagian kewenangan pemerintah kepada Camat bidang Pelayanan Umum tidak ada masalah
 - e.) Kegiatan pengendalian sebagian kewenangan pemerintah kepada Camat bidang Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Desa tidak ada masalah.

a. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya :

Analisa efisiensi adalah efisiensi penggunaan input untuk mendapatkan output berdasarkan hasil analisa terhadap pencapaian program/kegiatan tahun 2024 yang telah dilakukan dengan 23 kegiatan. Kegiatan tersebut seluruhnya didukung oleh sumber daya dari seluruh dana kegiatan. Berdasarkan penghitungan analisis efisiensi menunjukkan semua kegiatan tersebut telah dilakukan sesuai antara rencana dan realisasi input dan output.

Analisis efektivitas adalah keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran. Pada Tahun 2019 telah dilakukan 23 (dua puluh tiga) Kegiatan, dari hasil perhitungan efektivitas menunjukkan bahwa semua outcome kegiatan tersebut telah efektif yang berarti semua output yang dihasilkan telah dimanfaatkan sesuai dengan fungsi yang diharapkan.

b. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja di Kecamatan Plered seluruhnya menunjang, yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Program ini mendukung kelancaran pelaksanaan tugas perkantoran.
2. Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur. Program ini mendukung kelancaran tugas dan pemeliharaan Aset yang ada di kecamatan.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur. Program ini mendukung kelancaran tugas para aparatur di kecamatan.
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. Program ini mendukung kelancaran pelaporan kinerja dengan tepat waktu.
5. Program Pengembangan Sistem Perencanaan Sektoral. Program ini menghasilkan dokumen perencanaan kinerja (Renja)
6. Program Pelimpahan Kewenangan Pemerintah kepada Camat. Program ini mendukung kegiatan-kegiatan di kecamatan diantaranya melaksanakan rapat seksi, koordinasi, pembinaan dan fasilitasi.

BAB III
PERENCANA KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
KECAMATAN PLERED

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Perangkat Daerah selama lima tahun.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Rumusan tujuan merefleksikan konteks pembangunan yang dihadapi Perangkat Daerah dan memiliki keterkaitan dengan visi, Misi Perangkat Daerah yang ingin dicapai. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan kedalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Dalam menentukan tujuan mutlak harus terukur, kuantitatif, ataupun tangible, namun setidaknya dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang akan dicapai dimasa mendatang.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi SKPD atau kelompok sasaran yang dilayani, adapun Tujuan dari Kecamatan Plered yaitu “**Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**” sedangkan Sasaran Kecamatan Plered yaitu :

1. Meningkatnya Pelayanan Publik di Kecamatan;
2. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan ketertiban Umum di Kecamatan;
3. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat.

serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Kriteria dalam perumusan sasaran yakni :

- a. *Specific* (spesifik), yakni sifat dan tingkat sasaran dapat diidentifikasi dengan jelas;
- b. *Measurable* (dapat diukur), yakni target sasaran dinyatakan dengan jelas dan terukur;
- c. *Achievable* (dapat dicapai), yakni target sasaran dapat dicapai terkait dengan kapasitas dan sumber daya yang ada;
- d. *Relevant* (relevan), yakni mencerminkan keterkaitan antara target sasaran dengan tujuan;
- e. *Time Bound* (batas waktu), yakni periode pencapaian sasaran ditetapkan; dan
- f. *Continuously improve* (perbaikan berkelanjutan), yakni sasaran dapat dicapai secara bertahap.

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas program, agar mampu eksis dan unggul dalam persaingan yang semakin ketat dalam lingkungan yang berubah sangat cepat, maka suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil. Program Kerja dan Kegiatan Kecamatan Plered Mengacu kepada Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Cirebon, Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Pendayagunaan Potensi Ekonomi Daerah.

Urusan Kewenangan Kantor Camat Plered pada Permendagri No 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menjadi urusan wajib adalah Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

4. Kepemudaan dan Olahraga
5. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
6. Pemberdayaan Masyarakat Desa
7. Kependudukan

Program-program dan kegiatan yang ada di kecamatan terangkum dalam urusan Otonomi Daerah, diantaranya Administrasi Umum, Administrasi Keuangan, Serta Pelimpahan sebagian Kewenangan dari Bupati Kepada Camat, Kecamatan Plered dalam RPJMD Kabupaten Cirebon terfokus dengan 9 (sembilan) Prioritas Pembangunan dalam rangka pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah sampai dengan tahun 2024, adapun Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Kecamatan Plered Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada Tabel Berikut:

BAB III

PERENCANAAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

7.1. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN KECAMATAN PLERED DALAM PERUBAHAN RENJA TAHUN 2024

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2024							
		Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif			Asal Ajuan	
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / Berkurang	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
2	3	4	5	6	7	8	9 = (8-7)	10	11
UNSUR KEWILAYAHAN					2,847,418,446	3,003,783,796	156,365,350		
KECAMATAN					2,847,418,446	3,003,783,796	156,365,350		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya prosentase kebutuhan dalam pelaksanaan SOP pelayanan pemerintah		100 Prosen	100 Prosen	2,515,334,146	2,672,675,996	157,341,850		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja perangkat daerah yang dihasilkan		6 Jenis	6 Jenis	2,599,200	2,599,200	-		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jl. Nyi Gede Cangkring Plered (Desa Kaliwulu - Kecamatan plered)	3 Dokumen	3 Dokumen	801,600	797,700	(3,900)	PIS	PIS
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jalan Nyi Gede Cangkring (- Kecamatan plered)	1 Dokumen	1 Dokumen	482,800	481,500	(1,300)	PIS	PIS
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jalan Nyi Gede Cangkring (- Kecamatan plered)	1 Dokumen	1 Dokumen	482,800	481,500	(1,300)	PIS	PIS
Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jalan Nyi Gede Cangkring (- Kecamatan plered)	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-		
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jalan Nyi Gede Cangkring (- Kecamatan plered)	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jl. Nyi Gede Cangkring Plered (Desa Kaliwulu - Kecamatan plered)	15 Laporan	15 Laporan	858,000	838,500	(19,500)	PIS	PIS

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pengadministrasian keuangan		3 Jenis	3 Jenis	2,433,938,500	2,433,938,500	-		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Cirebon	15 Orang/bulan	15 Orang/bulan	2,336,103,000	2,431,521,000	95,418,000	PIS	PIS
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jl. Nyi Gede Cangkring Plered (Desa Kaliwulu - Kecamatan plered)	1 Laporan	1 Laporan	1,383,700	1,381,300	(2,400)	PIS	PIS
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jl. Nyi Gede Cangkring Plered (Desa Kaliwulu - Kecamatan plered)	18 Laporan	18 Laporan	1,059,600	1,036,200	(23,400)	PIS	PIS
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang teradministrasi dengan baik		25 Orang	25 Orang	-	-	-		
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jl. Nyi Gede Cangkring Plered (Desa Kaliwulu - Kecamatan plered)	25 Paket	25 Paket	-	-	-		
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah komponen penunjang kinerja pelayanan		8 Jenis	8 Jenis	80,512,500	80,512,500	-		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jl. Nyi Gede Cangkring Plered (Desa Kaliwulu - Kecamatan plered)	8 Paket	8 Paket	2,009,800	1,910,100	(99,700)	PIS	PIS
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jl. Nyi Gede Cangkring Plered (Desa Kaliwulu - Kecamatan plered)	8 Paket	8 Paket	55,683,550	57,817,000	2,133,450	PIS	PIS
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	KABUPATEN CIREBON (Desa Kaliwulu - Kecamatan plered)	30 Paket	30 Paket	-	-	-		
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jl. Nyi Gede Cangkring Plered (Desa Kaliwulu - Kecamatan plered)	7 Paket	7 Paket	3,947,700	3,647,100	(300,600)	PIS	PIS
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jl. Nyi Gede Cangkring Plered (Desa Kaliwulu - Kecamatan plered)	2 Dokumen	2 Dokumen	2,040,000	2,040,000	-	PIS	PIS
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Jl. Nyi Gede Cangkring Plered (Desa Kaliwulu - Kecamatan plered)	44 Paket	44 Paket	12,877,500	12,502,900	(374,600)	PIS	PIS
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jl. Nyi Gede Cangkring Plered (Desa Kaliwulu - Kecamatan plered)	11 Laporan	11 Laporan	1,450,000	1,450,000	-	PIS	PIS
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jl. Nyi Gede Cangkring Plered (Desa Kaliwulu - Kecamatan plered)	12 Laporan	12 Laporan	1,153,200	1,145,400	(7,800)	PIS	PIS

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan		4 Jenis	4 Jenis	-	-	-		
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jalan Nyi Gede Cangkring (- Kecamatan plered)	4 Unit	4 Unit	-	-	-		
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jl. Nyi Gede Cangkring Plered (Desa Kaliwulu - Kecamatan plered)	3 Unit	3 Unit	-	-	-		
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jl. Nyi Gede Cangkring Plered (Desa Kaliwulu - Kecamatan plered)	5 Unit	5 Unit	-	-	-		
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	KABUPATEN CIREBON (Desa Kaliwulu - Kecamatan plered)	1 Unit	1 Unit	-	-	-		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang urusan pemerintah daerah yang dibayarkan/dilaksanakan		2 Jenis	2 Jenis	30,538,896	30,538,896	-		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jl. Nyi Gede Cangkring Plered (Desa Kaliwulu - Kecamatan plered)	1 Laporan	1 Laporan	20,268,896	20,268,896	-	PIS	PIS
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jl. Nyi Gede Cangkring Plered (Desa Kaliwulu - Kecamatan plered)	15 Laporan	15 Laporan	10,270,000	10,270,000	-	PIS	PIS
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara		5 Jenis	5 Jenis	125,086,900	125,086,900	-		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jl. Nyi Gede Cangkring Plered (Desa Kaliwulu - Kecamatan plered)	10 Unit	10 Unit	39,052,500	-	(39,052,500)		PIS
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jl. Nyi Gede Cangkring Plered (Desa Kaliwulu - Kecamatan plered)	1 Unit	1 Unit	-	-	-		
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Jl. Nyi Gede Cangkring Plered (Desa Kaliwulu - Kecamatan plered)	30 Unit	30 Unit	-	-	-		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jl. Nyi Gede Cangkring Plered (Desa Kaliwulu - Kecamatan plered)	1 Unit	1 Unit	25,409,500	125,086,900	99,677,400	PIS	PIS
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jalan Nyi Gede Cangkring (Desa Kaliwulu - Kecamatan plered)	1 Unit	1 Unit	-	-	-		
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase Peningkatan Pelimpahan Efektifitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		100 Prosen	100 Prosen	165,296,200	165,217,900	(78,300)		

Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah koordinasi penyelenggaraan pemerintah di tingkat kecamatan		2 Jenis	2 Jenis	37,206,000	37,206,000	-		
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Plered (Desa Kaliwulu - Kecamatan plered)	1 Laporan	1 Laporan	11,400,000	11,338,200	(61,800)	PIK	PIK
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jl. Nyi Gede Cangkring Plered (Desa Kaliwulu - Kecamatan plered)	12 Dokumen	12 Dokumen	25,919,400	25,867,800	(51,600)	PIS	PIS
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah urusan pemerintahan yang dilaksanakan kecamatan yang tidak dilaksanakan oleh perangkat daerah.		3 Kegiatan	3 Kegiatan	23,922,000	23,922,000	-		
Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	- (- Kecamatan plered)	4 Laporan	4 Laporan	-	-	-		
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jl. Nyi Gede Cangkring Plered (Desa Kaliwulu - Kecamatan plered)	12 Laporan	12 Laporan	23,838,000	23,922,000	84,000	PIS	PIS
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah jenis urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat		3 Jenis	3 Jenis	104,089,900	104,089,900	-		
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Jalan Nyi Gede Cangkring (Desa Kaliwulu - Kecamatan plered)	12 Dokumen	12 Dokumen	-	-	-		
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Jl. Nyi Gede Cangkring Kaliwulu Plered (Desa Kaliwulu - Kecamatan plered)	12 Laporan	12 Laporan	-	-	-		
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jl. Nyi Gede Cangkring Plered (Desa Kaliwulu - Kecamatan plered)	12 Laporan	12 Laporan	104,138,800	104,089,900	(48,900)	PIK, PIS	PIK, PIS
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dilaksanakan		100 Prosen	100 Prosen	64,876,300	63,819,200	(1,057,100)		
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah jenis Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		3 Jenis	3 Jenis	63,819,200	63,819,200	-		
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jalan Nyi Gede Cangkring (Desa Kaliwulu - Kecamatan plered)	3 Lembaga Kemasyarakatan	3 Lembaga Kemasyarakatan	-	-	-		

Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	- (- Kecamatan plered)	4 Dokumen	4 Dokumen	-	-	-		
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jl. Nyi Gede Cangkring Plered (Desa Kaliwulu - Kecamatan plered)	12 Laporan	12 Laporan	64,876,300	63,819,200	(1,057,100)	PIK, PIS	PIK, PIS
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase Kegiatan Kordinasi untuk peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum		100 Prosen	100 Prosen	98,289,200	98,449,400	160,200		
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah rapat koordinasi dalam penyelenggaraan trantibum		12 Laporan	12 Laporan	50,000,000	50,000,000	-		
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	-	3 Laporan	3 Laporan	50,000,000	50,000,000	-	PIS	PIS
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		12 Laporan	12 Laporan	48,449,400	48,449,400	-		
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jl. Nyi Gede Cangkring Plered (Desa Kaliwulu - Kecamatan plered)	12 Laporan	12 Laporan	48,289,200	48,449,400	160,200	PIS	PIS

Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jalan Nyi Gede Cangkring (Desa Kaliwulu - Kecamatan plered)	12 Dokumen	12 Dokumen	-	-	-		
Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Fasilitasi Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jalan Nyi Gede Cangkring (Desa Kaliwulu - Kecamatan plered)	12 Dokumen	12 Dokumen	-	-	-		
Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Jalan Nyi Gede Cangkring (Desa Kaliwulu - Kecamatan plered)	12 Dokumen	12 Dokumen	-	-	-		
Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jalan Nyi Gede Cangkring (Desa Kaliwulu - Kecamatan plered)	4 Dokumen	4 Dokumen	-	-	-		
Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jl. Nyi Gede Cangkring Kaliwulu Plered Kabupaten Cirebon (Desa Kaliwulu - Kecamatan plered)	1 Dokumen	1 Dokumen	3,622,600	3,621,300	(1,300)	PIS	PIS

Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jalan Nyi Gede Cangkring (Desa Kaliwulu - Kecamatan plered)	12 Laporan	12 Laporan	-	-	-		
Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jalan Nyi Gede Cangkring (Desa Kaliwulu - Kecamatan plered)	4 Laporan	4 Laporan	-	-	-		
					2,847,418,446	3,003,783,796	156,365,350		

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN TAHUN 2024			
			Satuan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Keterangan
Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik		indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pemerintah tingkat Kecamatan	Prosen	78,00	78,00	
	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	Meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat.	Persen	81,50	85,00	
	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Persentasi Jumlah Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Umum dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan.	Prosen	70,00	70,00	
	Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat	Indeks Desa Membangun	Poin	0,70	0,70	



**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
KECAMATAN PLERED**

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DINDIN WAHYUDIN RIDWAN, S.Sos.
Jabatan : Camat Plered

Selanjutnya disebut **Pihak Kesatu**

Nama : WAHYU MIJAYA
Jabatan : Pj. BUPATI CIREBON

Selaku atasan pihak kesatu, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

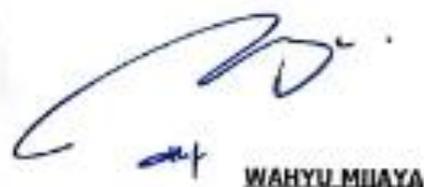
Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

 Pihak Kedua

Sumber, Oktober 2024

Pihak Kesatu,


WAHYU MIJAYA


DINDIN WAHYUDIN RIDWAN, S.Sos.
Pembina Tk.I
NIP. 19700207 199006 1 001



LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
KECAMATAN PLERED
PEMERINTAH KABUPATEN CIRIBON

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (Impact / Dampak)	Perhitungan			Sumber Data		Target Kinerja	
			Rumus	Tipe	Target	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
1.1.	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1.1.01.	Meningkatnya Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kapuasan Masyarakat terhadap layanan Pemerintah tingkat kecamatan Indeks Kapuasan Masyarakat (IKM).	Hasil survei Indeks kepuasan masyarakat Hasil Survey IKM sesuai dengan peraturan yang berlaku	Non Kumulatif Non Kumulatif	Meningkat Meningkat	survei indeks kepuasan masyarakat Kuesioner Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) per Kecamatan	95 Prosen 4 Point	95 Prosen 4 Point	
1.1.02.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Keterlibatan Umum di Kecamatan	Prosentase Unsur Pelimpahan Kewenangan Pemerintahan Umum dan Keterlibatan Umum yang dilaksanakan	$\frac{\text{Jumlah SOP yang diinkorporasi}}{\text{Jumlah SOP yang dibuat}} \times 100\%$	Non Kumulatif	Meningkat	Delta hasil pelaporan dan evaluasi kinerja perangkat daerah di kecamatan	80 Prosen	80 Prosen	
1.1.03.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	Indeks Desa Membangun (IDM).	capaian indeks desa membangun	Non Kumulatif	Meningkat	Delta Hasil pelaporan dan evaluasi kinerja perangkat daerah di kecamatan	0.64 Porsen	0.64 Porsen	

No	Program	Indikator Kinerja (Outcome / Hasil)	Perhitungan			Sumber Data		Target Kinerja		Kec.
			Rumus	Tipe	Target	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1.1.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya prosentase kebulatan dalam pelaksanaan SOP pelayanan Pemerintah	$\frac{\text{Jumlah SOP yang diinkorporasi}}{\text{Jumlah SOP yang dibuat}} \times 100\%$	Non Kumulatif	Meningkat	data SOP kecamatan yang di tingkatan	100 Prosen	100 Prosen	(11)	(12)
1.1.02.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase Peningkatan Pelimpahan Efektifitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		Non Kumulatif	Meningkat	Delta Laporan hasil capaian monitoring dan evaluasi tingkat kecamatan	100 Prosen	100 Prosen	2.672.675.996,00	Sumber Dana: BPHTB, DTU-DALU, PAD, FBBP2, Pjk Pan Jh
1.1.02.03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dilaksanakan		Non Kumulatif	Meningkat	Delta Laporan Hasil Capaian Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dilaksanakan	100 Prosen	100 Prosen	165.217.900,00	Sumber Dana: BPHTB, FBBP2
									63.819.200,00	Sumber Dana: BPHTB, FBBP2

No	Program	Indikator Kinerja (Outcome / Hasil)	Perhitungan			Sumber Data	Target Kinerja		Anggaran (Rp.)		Ket.
			Rumus	Tipe	Target		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.1.02.04.	PROGRAM KOORDINASI KETRANAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase Kegiatan Koordinasi untuk peningkatan Ketertarikan dan Ketertiban Umum	<small>Jumlah Kegiatan Koordinasi Ketertarikan dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan / Jumlah Kegiatan Koordinasi Ketertarikan dan Ketertiban Umum yang direncanakan x 100%</small> (4)	Non Kumulatif	Meningkat	Data Laporan Hasil Capaian Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Koordinasi untuk Peningkatan Ketertarikan dan Ketertiban Umum Tingkat Kecamatan	100 Prosen	100 Prosen	98.449.400,00	98.449.400,00	Sumber Dana: BPHTB, PBBP2
1.1.03.06.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Peningkatan Prosentase kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa	Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan yang dilaksanakan dibagi Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan yang direncanakan dikali 100%	Non Kumulatif	Meningkat	Hasil Monitoring dan evaluasi kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100 Prosen	100 Prosen	3.621.300,00	3.621.300,00	Sumber Dana: PBBP2
J U M L A H									2.550.076.796,00	3.003.783.796,00	

 Pihak Kedua
Pj. BUPATI CIREBON,


WAHYU MJAYA

Sumber, Oktober 2024
Pihak Kesatu
Camat Plered,



DINDIN WAHYUDIN RIDWAN, S.Sos.
Pembina Tk.I
NIP. 19700207 199006 1 001

BAB IV

PENUTUP

Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan instansi pemerintah khususnya di lingkungan Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon ditetapkan sebagai dasar untuk menilai maupun melihat tingkat kinerja suatu program yang dijalankan unit kerja, dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja masing-masing. Pengukuran Kinerja dilakukan untuk mengelola kinerja agar organisasi dapat mencapai hasil yang lebih baik dan kinerja yang tinggi.

Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama secara formal, maka diharapkan akan dapat diperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik, dan lebih berhasil. Informasi yang diperoleh akan dipakai acuan dalam membuat keputusan-keputusan yang dapat memperbaiki kegagalan, mempertahankan keberhasilan dan meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

Plered, November 2024


PEMERINTAH KABUPATEN
CAMAT PLERED,
KECAMATAN
PLERED
DINDIN WAHYUDIN RIDWAN, S.Sos.
Pembina Tk.I
NIP. 19700207 199006 1 001

